

BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang multikultural, yakni suatu negara yang memiliki beragam perbedaaan, baik itu dari segi agama, warna kulit, bahasa, suku, dan budaya. Oleh karena itu Indonesia di tuntut untuk memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme sebagai pemersatu bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nasionalisme adalah suatu paham/ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri sedangkan patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran rakyatnya.

Nasionalisme adalah suatu perjuangan ideologi untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas penduduk yang membentuk suatu negara (Smith, 1998: 13). Pandangan serupa juga dijelaskan oleh Ernest Gellner, nasionalisme merupakan suatu yang diciptakan sebagai akibat munculnya *nation*. Terbentuknya suatu *nation* dan nasionalisme bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan suatu penemuan atau suatu yang diciptakan dan didasarkan pada keinginan untuk hidup bersama berkat adanya beberapa kesamaan dan dimotori oleh kelompok elit atau intelektual yang berada di perkotaan.

Kaum elit dan kaum intelektual yang tergabung dalam sebuah organisasi sangat penting dalam hal penyebar luasan kesadaran berbangsa di Indonesia. Munculnya Boedi Oetomo (BO) pada 1908 sebagai organisasi priyayi yang awalnya memperjuangkan kesadaran orang Jawa juga memotivasi lahirnya

berbagai organisasi baru yang bersifat kedaerahan, seperti Jong Java pada 1918, Jong Sumatra Bond pada 1917, persekutuan mahasiswa Minahasa pada 1918, dan Jong Ambon pada 1918 (Ricklefs, 2008). Sementara itu, awal kemunculan kesadaran nasional Indonesia baru dimulai dikalangan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda dalam Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1922, yang dimotori Mohammad Hatta, Natsir, Achmad Soebardjo, dan Soekiman Wirjosandjojo. PI berusaha menghilangkan rasa kedaerahan dan menghimpun persatuan menghadapi Belanda.

Boedi Oetomo sebagai pioner pada periode ini yang dibentuk oleh para pemuda terpelajar menggunakan “moral” sebagai landasan organisasinya, dan dengan tujuan “Memajukan Pendidikan Anak Bangsa”. Sebagai Bangsa terjajah inisiatif Boedi Oetomo menyentuh masalah moral dan pendidikan amatlah penting. Merubah kemiskinan dan kebodohan dengan perlawanan bersenjata adalah sesuatu yang mustahil. Masyarakat manusia harus diberi alat untuk merubah nasibnya, dan senjata yang terbaik adalah pendidikan.

Gagasan cemerlang para pemuda terpelajar yang terhimpun dalam Boedi Oetomo ini telah menjadi tonggak perjuangan masa-masa berikutnya. Walau secara politis ia tidak pernah menjadi kekuatan utama, namun sebagai pioner Boedi Oetomo telah mampu mendorong tumbuhnya kesadaran anak bangsa ini untuk mendefinisikan nasionalisme sosok perjuangan yang lebih ampuh pada satu sisi, dan pada sisi lain ia berhasil menyentak kemapanan kolonial imperialisme Belanda di negeri jajahannya.

Sebagai bukti telah timbulnya kesadaran tersebut di atas, pada periode berikutnya terlahirlah berbagai organisasi pergerakan seperti Serikat Dagang Islam

di Lawean Solo. Dan dengan berbagai dinamika baik yang disebabkan faktor internal dan eksternal yang pada mulanya sebagai organisasi pemberdayaan ekonomi, pada akhirnya menjadi organisasi politik yang bernama “Sarekat Islam”.

Sentakan yang ditimbulkan oleh lahirnya Sarekat Islam, tidak hanya menyangat kemapanan kaum kolonial-imperialis, tapi juga menginspirasi generasi bangsa untuk sadar dan proaktif memantapkan akar nasionalisme. Kesadaran ini tercermin dengan lahirnya berbagai organisasi politik pada masa selanjutnya seperti: PKI yang dipelopori Seamun dkk, yang beraliran Marxis-Komunis; PNI yang didirikan oleh Sukarno yang beraliran Nasionalis Marhaenis dan tidak sedikit pula lahir organisasi politik dengan ciri khas agama yakni Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), serta organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Elan-vital peristiwa kebangkitan nasional ini, disusul pula dengan episode paling dramatis yang dikokohkan para pemuda bangsa dalam bentuk Sumpah Pemuda 1928, yang secara khusus dan spesifik telah mengarah pada muara elen-vital revolusi yang digagas bersama yakni konsensus bertanah air, dan berbangsa satu yakni Indonesia, dengan pengikat bahasa kesatuan yaitu Bahasa Indonesia.

Yang terpenting dari proses panjang lahirnya nasionalisme ini bahwa pada satu sisi, nasionalisme telah melahirkan kekuatan baru sebagai penantang kemapanan kekuasaan kolonial imperialis Belanda; dan pada sisi yang lain dikalangan para cendekiawan bangsa telah terjadi diskusi yang menarik tentang nasionalis apa yang menjadi landasan kehidupan kita sebagai bangsa.

Hal mengenai landasan kehidupan sebagai bangsa, Anhar Gonggong (1995) menandai dua peristiwa penting bertalian dengan perdebatan dan polemik tentang landasan kehidupan sebagai bangsa yaitu: (1) polemik antara Cipto Mangunkusumo

dengan Soetatmo Soeryokoesoemo; dan (2) perdebatan antara Soekarno dengan H.Agus Salim dan Mohammad Natsir. Polemik antara Tjipto Mangunkusumo dengan Soetatmo, berpangkal pada rumusan mereka tentang jenis nasionalisme yang akan dikembangkan yakni antara nasionalisme India yang digagas oleh Cipto Mangunkusumo, dan nasionalisme Jawa yang dikembangkan oleh Soetatmo. Sedangkan polemik Soekarno dengan H.Agus Salim berpangkal pada ide penataan Negara yang memisahkan antara unsur agama dan negara. Dengan menyitir gagasan Kemal Pasha di Turki, Soekarno dalam majalah “Panji Islam” telah dengan jelas menawarkan ide pemisahan antara urusan agama dan negara di dalam menata masyarakat. Sedangkan Mohammad Natsir dalam tulisannya “Dualisme” dalam Caisaro Papisme dan Kemalisten di Indonesia, menawarkan gagasan yang justru berlawanan dengan gagasan Soekarno.

Diskusi pemantapan dan rumusan tentang landasan untuk menata negara-bangsa yang diperjuangkan secara lebih intensif, terjadi pada periode penjajahan Jepang, terutama bulan-bulan menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Melalui badan beranggotakan 62 orang yang kemudian dikenal dengan nama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), para pemimpin kita mendiskusikan perangkat konstitusional yang akan menjadi dasar dan pengaturan hidup negara-bangsa yang merdeka.

Rumusan yang telah dihasilkan pada periode BPUPKI tersebut, pada periode setelah Proklamasi Kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh rapat PPKI diterimalah UUD 1945 sebagai landasan Konstitusi Negara Indonesia Merdeka, yang dalam bahasa Tata Negara disebut sebagai Hukum Dasar Negara.

Sukses pemancangan dasar keindonesiaan itu ditopang oleh besarnya kesetiaan nasional sehingga membentuk apa yang oleh Ben Anderson disebut sebagai *the imagined communities* di dada setiap pelaku revolusi (Fattah, 1999). Kesetiaan nasional diposisikan pada tempat paling tinggi mengatasi kesetiaan primordial dan subnasional sehingga membentuk elan-nasionalisme yang disukmai oleh roh egaliter, konsensus moral, semangat kebersamaan dan kemitraan serta otonomi partisipasi (Yudana, 2004).

Puncak kesadaran keindonesian menjadi lebih kuat dan nyata setelah bangsa Indonesia menjadi suatu *nation state* pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Nasionalisme Indonesia adalah paham kebangsaan Indonesia yang tumbuh karena perasaan tertindas. Perasaan senasib dan seperjuangan seluruh rakyat membangkitkan perlawanan terhadap penjajah *Belanda* demi kemerdekaan Indonesia. Menurut Kahin, terbentuknya *nation state*, Indonesia yang berdasarkan administrasi. Belanda telah mengintegrasikan orang-orang dari berbagai bahasa dan budaya ke dalam satu entitas politik, sehingga membangun semacam kesadaran nasional. (Kahin, 1952; dan leirissa 2006).

Organisasi yang dibentuk sebelum Proklamasi Kemerdekaan, didirikan atas dasar kesamaan latar belakang masing-masing, yang identik dengan perjuangan atas nama golongan. Puncak dari organisasi itu melahirkan Kongres Pemuda, yang meleburkan keragaman menjadi persatuan atas nama bangsa Indonesia dan atas nama penjajahan, oleh subjek yang sama, dan di bumi yang masih menjadi satu pijakan. Arah dan tujuan organisasi pra-kemerdekaan sudah jelas yaitu, untuk melawan penindasan dan mencapai kemerdekaan.

Dengan menjunjung tinggi persatuan tanpa membeda-bedakan berangkat dari golongan mana seseorang berasal. Namun saat ini, semenjak munculnya isu-isu terorisme dan radikalisme organisasi sering mendapatkan citra negatif sebagian masyarakat memandang bahwa organisasi sebagai tempat terorisme dan radikalisme, pola pendidikan yang diterapkan didalamnya hanya berdasarkan keagamaan saja dan bahkan sebagian masyarakat juga menganggap bahwa orang-orang yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang fanatik akan agama mereka.

Dalam hal ini tentunya tokoh- tokoh elit khususnya tokoh organisasi tidak akan tinggal diam, tokoh – tokoh agama mulai dari Islam, Hindu, Kristen dan Budha yang tergabung dalam sebuah Organisasi memainkan peran strategis dalam mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan. Salah satu langkahnya adalah mencegah dan mengantisipasi lahirnya bibit-bibit radikal, langkah mahar, penelitian, bahkan seminar nasional di berbagai lapisan masyarakat. cukup. Usaha peran dari tokoh keagamaan dirasa penting, ketika negara di landa maraknya paham radikalisme pada priode terakhir ini banyak dilakukan di Indonesia terdapat banyak organisasi kemasyarakatan baik dari kalangan Islam, Hindu, Kristen, Katolik, maupun Budha.

Di dalam kalangan Islam terdapat dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul ulama' dan Muhammadiyah. Nahdlatul ulama' memiliki organisasi kemahasiswaan yang disebut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PMII yang di kenal dengan sebutan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 April tahun 1960 di Surabaya

Adapun ketua umum pertama PMII bernama Mahbub Djunaedi. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi AhlulSunnah wal Jama'ah. Dibawah ini adalah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab berdirinya PMII:

1. Carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959.
2. Tidak menentukannya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.
3. Pisahnya NU dari Masyumi
4. Ketika PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno, Bung Karno meminta kepada NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa Islam yang 'Indonesia' maka berdirilah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Hal-hal tersebut di atas menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat dikalangan intelektual-intelektual muda NU untuk mendirikan organisasi sendiri sebagai wahana penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahasiswa yang berkultur NU. Disamping itu juga ada hasrat yang kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi AhlulSunnah Wal Jama'ah. Dengan beraskan Pancasila. Tujuan PMII sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (AD PMII) BAB IV pasal 4 "Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia".

Secara filosofis, PMII tersusun dari empat kata yaitu: (1) Pergerakan (2) Mahasiswa (3) Islam dan (4) Indonesia. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalfahannya.

Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara. “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunah wal jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan.

Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (*civilized*). Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45.

Pergerakan PMII berporos pada dua landasan utama, yakni visi ke-Islaman dan visi kebangsaan. Visi ke-Islaman yang dibangun PMII adalah visi ke-Islaman yang inklusif-terbuka, toleran dan moderat. Sedangkan visi kebangsaan PMII berbentuk kontruk-idealisme satu kehidupan kebangsaan yang demokratis, toleran, dan dibangun di atas semangat bersama untuk mewujudkan keadilan bagi segenap elemen warga-bangsa tanpa terkecuali. Merupakan manifestasi dari komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, dan sebagai perwujudan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. Dengan kesadaran ini, PMII sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan yang berideologi Islam Ahlussunnah waljamah mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar untuk melakukan gerakan dakwah islamiyah, yaitu mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin yang bisa diterima semua elemen masyarakat sesuai dengan kultural masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang merupakan warisan leluhur.

Mahasiswa tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi ekstra kampus yang para pelakunya biasa disebut aktifis menjadi instrument penggerak dalam menumbuh dan menguatkan nilai-nilai nasionalisme pada mahasiswa untuk selalu menyuntik mahasiswa sebagai tambahan stamina demi menggelorakan semangat baru yang akan selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan zaman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peran Organisasi Pmii (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Buleleng Dalam Meningkatkan Rasa Nasionalisme Dan Patriotisme Mahasiswa Muslim Di Kabupaten Buleleng.**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang yang sudah diamati, maka peneliti mengidentifikasi masalah :

- 1.2.1 Organisasi memiliki citra negatif di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa organisasi menjadi tempat doktrinasi radikal.
- 1.2.2 Organisasi di curigai sebagai sarang terorisme yang hal itu mengancam keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila.
- 1.2.3 Organisasi PMII Cabang Buleleng masih selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila, Islam dan NKRI.
- 1.2.4 Memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa kader PMII di Kabupaten Buleleng masih sejalan dengan pendidikan karakter, Pancasila, Islam dan NKRI.

1.3 BATASAN MASALAH

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah.

- 1.3.1 Program- program PMII cabang Buleleng dalam meningkatkan rasa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa muslim di Kabupaten Buleleng.
- 1.3.2 Faktor- faktor yang dapat di lakukan PMII cabang Buleleng dalam meningkatkan rasa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa.
- 1.3.3 Faktor- faktor yang menjadi penghambat bagi PMII cabang Buleleng dalam meningkatkannya rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Program- program apa saja yang di laksanakan PMII Cabang Buleleng dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme anggotanya?
- 1.4.2 Faktor-faktor apa saja yang mampu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa muslim di Kabupaten Buleleng.
- 1.4.3 Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat terciptanya rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa muslim di kabupaten buleleng.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Untuk mendiskripsikan program- program PMII Cabang Buleleng dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa muslim di Kabupaten Buleleng..

1.5.2 Untuk mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang mampu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa muslim di Kabupaten Buleleng

1.5.3 Untuk mendiskripsikan faktor-faktor penghambat terciptanya rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa muslim di Kabupaten Buleleng

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti : sebagai informasi dan pengetahuan mengenai peranan organisasi pergerakan mahasiswa islam indonesia dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa dan untuk mengembangkan ilmu yang di dapatkan selama kuliah
- b. Bagi pembaca : sebagai menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk mengetahui peran organisasi PMII cabang buleleng dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme mahasiswa.

1.6.2 Manfaat Praktis.

- a. Bagi peneliti sebagai media untuk mentransformasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan di lapangan guna menambah wawasan ilmu pengetahuan.

- b. Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai masukan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam memilih organisasi ekstra kampus.
- c. Bagi pembaca sebagai informasi bagi penelitian yang sejenis dan dapat menjadi acuan bagi penulis dan peneliti lainnya secara luas dalam penulisan karya ilmiah.

